

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LANGKAT

(THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN EMPOWERMENT OF MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN LANGKAT REGENCY)

Siti Nurhalita^{1*}, Imsar²

¹Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Willièm Iskandar Ps.V,
20371, Indonesia

² Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Willièm Iskandar Ps.V,
20371, Indonesia

*E-mail: ¹sitinurhalita0611@gmail.com,
²imsar@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, Pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam Negeri. Dan UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, agar bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan. Dan Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Namun Disisi lain UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan yaitu terbatasnya modal kerja, pengelolaan yang kurang professional dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang kurang terampil yang dimiliki UMKM. dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan yang seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, dan agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Dan adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara dengan melakukan pengamatan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in economic development in the region, local governments should pay attention to the growth and development of business fields. Local governments must make a real contribution to MSMEs in maintaining existing products at a time when many imported products enter the domestic market. And MSMEs that grow a lot in various regions must be developed by local governments, so that they can become one of the keys to improving the regional economy. Empowerment is one of the government's tasks to raise and provide real support to the community so that they have the ability to develop the potential that exists in the community by developing local businesses that will create jobs for the community, as well as developing community innovation independently to meet their economic needs. . Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to expand and provide opportunities for the community for equitable distribution and increase in income. And the existence of MSMEs cannot be doubted because they have

proven to be able to survive and become the driving force of the economy, especially after the economic crisis. On the other hand, MSMEs also face many problems, namely limited working capital, unprofessional management due to limited knowledge and unskilled human resources owned by MSMEs. and the lack of mastery of science and technology. so that the government which has the authority and power in policy-making should cooperate with the private sector to provide training to MSMEs so that they can survive, and so that their businesses can develop in the future. And as for the research method used in this study, namely by using qualitative research methods in the form of interviews with observations.

Keywords: Empowerment, Micro, Small, Medium Enterprises

Copyright © 2018 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu hal penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Langkat sendiri. Karena UMKM mempunyai hak yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah hendaknya para Pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih untuk tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Dan pemerintah seharusnya menyalurkan ide yang nyata untuk UMKM dalam mempertahankan produk mereka pada saat banyaknya produk luar negeri yang masuk di Pasar Indonesia. Sehingga pemberdayaan UMKM yang berada pada arus global dan banyaknya saingan membuat UMKM untuk bisa melihat besarnya tantangan global, seperti misalnya meningkatnya kualitas produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan daerah dari segi pemasaran hingga keluar Negeri. Karena ini perlu dilakukan agar bisa meningkatkan nilai jual UMKM, agar bisa menyaingi produk – produk luar yang masuk dipasar dalam negeri. UMKM yang tumbuh dan berkembang di bermacam daerah seharusnya bisa kelola oleh pemerintah daerah, karena UMKM merupakan salah satu kunci untuk jumlah peningkatan perekonomian daerah.

Pemberdayaan adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan dan memberikan perhatian secara langsung kepada masyarakat agar mereka bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Dengan cara pengembangan pada usaha lokal yang mana

nantinya akan terwujud lowongan pekerjaan untuk masyarakat, dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki masyarakat untuk dapat memuaskan kebutuhan ekonomi secara mandiri. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang mana bisa memperluas dan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dan UMKM merupakan salah satu kunci ekonomi nasional yang seharusnya mendapatkan hak untuk didukung, dan dilindungi sebagai salah satu bentuk dukungan yang tegas kepada sekelompok usaha ekonomi masyarakat. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ini diharapkan bisa memperluas lapangan kerja, agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat serta bisa lebih banyak membuka tenaga kerja. Dan diharapkan dengan adanya UMKM mengurangi angka pengangguran di Indonesia terutama di Kabupaten langkat.

Berdasarkan data UMKM yang didapatkan di Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut :

Data Usaha	Jumlah
Usaha Mikro	75.085
Usaha Kecil	9.469
Usaha Menengah	2.821
Usaha Pemula	87.496
Total	174.871

Dari data UMKM tersebut sudah tersebar di 23 Kecamatan, 40 kelurahan dan 225 desa. Dan para UMKM ini terbukti mampu menciptakan peluang pekerjaan yang sangat besar di Kabupaten Langkat, sehingga sangat membantu mengurangi angka pengangguran

dengan penyerapan tenaga kerja. Dan salah satu bentuk pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat yaitu mengasi modal, pengembangan kewirausahaan, serta mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM, serta memberikan bimbingan kepada pelaku usaha Mikro Kecil dan menengah. (Sumber, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat. Data diambil pada 10 Februari 2022).

Walaupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah memperlihatkan peranannya dalam membuka lapangan tenaga kerja, namun peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk keberlangsungan memberdayakan UMKM khususnya di Kabupaten Langkat, karena melihat dari jumlah persaingan yang masih sangat begitu banyak di dunia UMKM, sehingga para UMKM di kabupaten langkat berusaha untuk bisa terus maju serta mandiri agar bisa terciptanya ekonomi daerah yang mandiri serta bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang sama dengan alasan digunakannya desentralisasi yang menjadi otonomi kepada masing – masing pemerintah daerah agar bisa memberikan para pemerintah. Namun pemerintah daerah belum bisa sepenuhnya mewujudkan dunia UMKM, karena lihat dari cara serta penyusunan kebijakan publik yang tidak memilih terhadap UMKM sehingga banyak para UMK yang terhalang untuk memasarkan produk serta adanya kekurangan finansial yang menjadi jarak menentukan keinginan tingkat lokal sehingga pemerintah daerah tidak bisa menyalurkan bantuan seperti modal dan juga alat- alat yang digunakan oleh para pelaku UMKM, jadi para pelaku UMKM harus menggunakan dana serta alat sendiri untuk sebagai penunjang dan agar bisa bertahan.

Dan adapun permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM yang berhubungan dengan cara pengolahan yang kurang baik, karena kurangnya pengetahuan dan SDM yang kurang terampil sehingga pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam pembuatan kebijakan diharapkan dapat bekerjasama dengan para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan agar mereka bisa bertahan dan supaya usaha

yang mereka miliki dapat berkembang jauh lebih baik lagi dikemudian hari.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yang mana dimulai dari 17 Januari – 17 Februari 2022. Dan penelitain ini berlokasi di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Dan adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dan penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan serta mencari sejumlah informasi yang rinci tentang subjek dan latar social penelitian. Dan pengetahuan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa wawancara dengan melakukan pengamatan yang mana nantinya akan dibentuk suatu susunan cerita yang sangat terperinci yang termasuk dalam ungkapan – ungkapan asli dalam penelitian.

1. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.
2. Kasubbag Umum Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.
3. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.
4. Kepala Bidang Pengawasan UKM Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.
5. Pelaku UMKM 2 Orang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto (2002), berpendapat bahwa peranan yaitu salah satu aspek dinamis yang mana kedudukan (status), dan jika seseorang melakukan hak serta kewajibannya yang mana sesuai dengan kedudukannya. Jadi jika seseorang menduduki suatu tempat dalam masyarakat serta mampu menjalankan peran.

Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi Amrusi (2012). Pemerintah daerah adalah dengan ikut serta dalam bagian dari sistem penyelenggara pemerintah nasional yang memiliki tugas untuk mengarahkan dan mengurus rumah tangga sendiri. Dan kewajiban untuk mengarahkan dan mengurus rumah tangga merupakan tiga hal penting yaitu : pertama memberikan amanah untuk menyiapkan kewajiban yang memang diberikan kepada

pemerintah daerah; kedua member kepercayaan serta tanggung jawab untuk mendapatkan inspirasi untuk menentukan sendiri proses – proses menyelesaikan tugas; dan yang ketiga tugasnya yaitu upaya memberikan dan mengambil buah piker dan pengambil keputusan tersebut serta mengikuti keputusan masyarakat baik secara langsung ataupun melalui DPRD.

Menurut mereka pemberdayaan merupakan serangkaian aktifitas untuk bisa memperkuat dan bisa bersaing dalam keunggulan dan kelompok yang lemah dalam masyarakat merupakan individu yang memiliki kekurangan dari segi ekonomi. Sehingga sebagai tahapan pemberdayaan merujuk pada suatu kesanggupan untuk bisa ikut serta dan bersaing dengan baik dalam mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses sumberdaya dan layanan yang dibutuhkan guna memperbaiki mutu hidup, baik dengan lingkungan kelompok maupun individu. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara dimana masyarakat yang memiliki kekurangan sumber daya, dan sekelompok wanita serta kelompok yang lainnya.

Menurut Wilantara dan Susilawati (2016) menjelaskan ada cara dalam mengembangkan kebijakan perkembangan UMKM, yang mengemukakan bahwa defenisis dan kriteria UMKM yaitu ;

- 1) Usaha Mikro merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki oleh satu orang atau usaha perorangan yang telah memenuhi syarat Usaha Mikro.
- 2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri secara individu, yang mana dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang mana bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimiliki, atau dikuasai. Dan menjadikan bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri secara individu, dan ini dilakukan oleh

perseorangan atau badan usaha yang tidak memiliki cabang baik dikuasai secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun besar dengan angka kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pada bagian ini saya sebagai peneliti akan membahas tentang beberapa hasil data yang didapatkan dari hasil wawancara yang peneliti jalankan dengan para informan, dan penelitian ini mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikaji melalui teori menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis.

Peran Fasilitatif

Dalam melakukan penunangan produktifitas dan juga pemasaran hasil produksi Dinas Koperasi dan UKM melakukan koordinasi dengan banyak pelaku usaha untuk dapat mempromosikan hasil produksi dengan cara melalui pameran – pameran yang dilakukan oleh para pemerintah baik dari provinsi maupun kabupaten. Walaupun hanya sekedar melakukan promosi pemerintah sudah bisa membantu para pelaku usaha dalam melakukan promosi brosur – brosur lokal dari sentra produksi. Dan pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM berusaha memperkenalkan produksi hasil olahan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun hanya beberapa barang yang berkualitas dan memiliki kemasan yang bagus yang dipilih untuk dibawa ke pameran. Karena biasanya pameran hanya diadakan satu tahun sekali sehingga tidak terlalu berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga Dinas Koperasi dan UKM belum dapat memberikan fasilitas dan pendanaan yang maksimal, akan tetapi Dinas Koperasi dan UKM tetap berusaha memberikan fasilitas berupa alat-alat usaha dan pelatihan yang sekiranya dapat menunjang bagi pelaku usaha melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara hasil dari wawancara yang dilakukan di lapangan memperlihatkan bahwa promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat memang tidak terlalu

berdampak secara langsung terhadap pemasukan pelaku usaha. Namun untuk bagian pelatihan dan pemberian motivasi melalui seminar yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat ini sangat berpengaruh dan berdampak besar bagi para pelaku usaha. Karena ini menjadi penyemangat bagi para pelaku usaha dan adapun penyuluhan kewirausahaan diharapkan dapat menunjang semangat dan jiwa entrepreneurship bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dan juga dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan minat pengusaha baru setiap tahunnya.

Peran Edukasional

Peran edukasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha serta memberikan keterampilan usaha untuk dapat meningkatkan hasil produktivitas pelaku usaha. Dan dari hasil penelitian wawancara dilapangan didapatkan bahwasanya Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan juga swasta untuk meningkatkan hasil usaha dan juga memberikan penyuluhan kewirausahaan, dan juga melakukan seminar yang dilakukan di tiap sektor pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dan dinas koperasi dan UKM juga melakukan dampingan dengan semua para usaha supaya mereka bisa jadi mandiri dalam mengembangkan usahanya untuk lebih maju kedepannya.

Dari hasil wawancara dilapangan tidak semuanya para pelaku usaha dapat terjangkau, karena ada sebagian pelaku usaha yang tidak dilakukan penyuluhan kewirausahaan, dikarenakan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Langkat ada banyak dan tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat, karena banyaknya keterbatasan anggaran dari dinas yang minim. Sedangkan dari Dinas Koperasi dan UKM bekerjasama dengan pemerintah pemerintah Provinsi dalam mendampingi UKM maupun

koperasi, yaitu dengan Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL) dan juga pendamping UKM dalam memberikan informasi. Serta memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Peran Representatif

Dalam proses pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah kota saling bekerjasama dalam menyalurkan bantuan kepada para pelaku usaha dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana cara kerjanya yaitu para pelaku usaha bekerjasama dengan Koperasi – koperasi di Kabupaten Langkat dalam proses peminjaman. Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat agar pemberian bantuan dana bisa tepat sasaran yaitu dengan cara mengumpulkan data para pelaku usaha serta lokasi tempat usaha kepada Dinas Koperasi dan UKM agar nantinya dapat dilakukan pemberdayaan. Dan pemerintah juga memberikan bantuan berupa dana dan juga pelatihan kewirausahaan kepada para pengrajin keramik atau gerabah di Desa Sukajadi Kecamatan Hinai.

Dan para Pemerintah Daerah terutama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat selalu memberikan pelatihan kepada para pengrajin keramik atau gerabah di Desa Sukajadi demi meningkatkan produktifitas, daya saing dan juga kemandirian. Namun banyak para pelaku usaha tidak memperkenalkan hasil produksi mereka ke media sosial. Dan pemerintah juga memperkenalkan hasil produksi para pelaku usaha hanya melalui pameran – pameran yang mana tidak memberikan dampak yang besar kepada para pelaku usaha. Sementara itu peran representative dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat hanya sekedar memberikan data serta lokasi pelaku usaha kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten.

Peran Teknis

Berkaitan dengan keterampilan teknis Dinas Koperasi dan UKM selalu melakukan pelatihan keterampilan bagi para ASN dalam mengoperasikan Kompute, sehingga hal ini

dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten dan UKM dalam melakukan tugasnya untuk mendata jumlah pelaku usaha yang masih aktif dan juga tidak aktif dan mendata bermacam – macam usaha, mulai dari tingkat bidang usaha, serta melakukan pendataan anggaran dan membuat laporan kerja. Serta dalam melakukan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM mereka selalu memberikan pelatihan dan juga pengembangan bagi pelaku usaha dalam rangka untuk memajukan dan memberikan informasi kepada para pelaku usaha.

4. KESIMPULAN

- 1) Dan proses untuk melakukan pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat cuman hanya memberikan semangat dan pengarahan kewirausahaan kepada para pelaku usaha. Dan selain itu Dinas Koperasi dan UKM juga selalu mendampingi para pelaku usaha dan juga koperasi.
- 2) Dalam proses pemberdayaan tidak bisa menjangkau semua para pelaku usaha, sehingga banyak para pemilik usaha yang tidak merasakan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM.
- 3) Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Langkat juga menjalankan berbagai pendataan jumlah pelaku usaha yang masuk aktif dan tidak aktif, serta macam – macam usaha, jumlah koperasi yang masih aktif, serta mereka juga melakukan pendataan dan membuat laporan hasil kerja.
- 4) Dan pemerintah juga menjalani kerjasama dengan Bank serta Dinas koperasi dan UKM untuk dapat memberikan bantuan pinjaman KUR bagi para pemilik usaha. Dan mereka juga menjalin hubungan dengan pihak luar untuk dapat meningkatkan keunggulan UKM.
- 5) Dan dana yang di kelurkan dari Para Pemerintah Daerah dianggap masih terlalu minim untuk mendukung fasilitas bagi UKM yang mana dilihat

dari pelaksanaannya pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

- 6) Dan tidak adanya regulasi di daerah yang merencanakan tentang UMKM.

5. SARAN

- 1) Semoga pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan aktifitas pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Dan usaha – usaha yang perlu ditingkatkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk pentingnya berwirausaha kepada masyarakat, dan memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan usaha serta sarana dan prasana pemasaran produk seperti media sosial yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.
- 2) Menindak lanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan dengan cara memberikan pelatihan penyuluhan kewirausahaan dan seminar. Supaya para pelaku usaha tidak hanya sampai di titik proses saja namun bisa sampai proses evaluasi hasil.
- 3) Dan Pemerintah Daerah bisa memberikan regulasi khusus yang berhubungan dengan UMKM di Kabupaten Langkat dengan mengeluarkan surat peraturan Bupati sehingga segala kegiatan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Karena pada dasarnya keadaan UMKM serta potensi yang mereka miliki setiap tahun berbeda – beda.
- 4) Dinas Koperasi dan UKM mereka harusnya bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha.
- 5) Baik itu Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan pelaku UMKM disarankan dapat bekerjasama dalam hal pemberdayaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Dharma, M. B. (2017). Strategi

- Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, (9), 461–475.
- D. Paramasari. (2009). *Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Misbakul Munir. (2021). Resiliensi Ekonomi Rumah Tangga Muslim Yogyakarta Masa Adaptasi Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.856>
- National, G., & Pillars, H. (2012). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Semarang*.
- National, G., & Pillars, H. (2020). *Pengaruh Bantuan Dana UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Sinjai Utara*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Prastika, H. C. (2012). Perpustakaan Universitas Airlangga. *Toleransi Masyarakat Beda Agama*, 30(28), 5053156.
- Santi Deliani Rahmawati, H. S. (2020). *Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi NTB Dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)* (Vol. 3, Issue 2017). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. (2014). Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. *Jurnal Keuangan & Moneter*, 16(1), 1–20.
- Widodo, D. (2008). *Strategi Pemberdayaan Umkm Pada Dinas Keperasi Dan Umkm Kota Surabaya*. 1–6.